



ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

Sri Ayu Ningsih

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: sriayuningsih14@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2022</p> <p>Revised : 03 Mei 2022</p> <p>Accepted : 01 Juli 2022</p> <p>Publication : 30 Juli 2022</p> <hr/> <p>Keywords: Regional Autonomy, Independence Ratio, Growth Ratio, Contribution Ratio</p> <p>Kata Kunci : Otonomi Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kontribusi.</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract : <i>Regional autonomy is a first step towards national economic development more powerful high growth by providing a better life for the community area. In carrying autonomous region, the regional government to run the government are required for effective, efficient and able to push the role of communities and improving equity and justice by developing the entire potential of each region. This study aims to determine the financial capacity in the implementation of regional autonomy and the level of independent. This study uses secondary data by taking locations in the Buton Utara district of west by using the calculation data of the regional revenue and expenditure budget (APBD) for the regency for the period 2015-2018. The analytical method used is quantitative descriptive analysis method which is then analyzed using growth ratio, independence ratio and contribution ratio. The results of the descriptive analysis generally show that is unable to process local revenue (PAD) which causes the independence to be very low. For the reason, it is hoped that the regency government will further improve the management of regional revenues so that the growth of PAD sources continues to increase.</i></p> <p>Abstrak: Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan lebih baik bagi masyarakat di daerahnya. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu mendorong masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil lokasi di Kabupaten Buton Utara dengan menggunakan data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode tahun 2015-2018. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif yang kemudian dianalisis menggunakan rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, dan rasio kontribusi. Hasil analisis deskriptif secara umum menunjukkan bahwa tidak mampu mengolah pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan kemandirian masih sangat rendah. Untuk itu diharapkan pemerintah lebih meningkatkan lagi pengelolaan pendapatan daerahnya agar pertumbuhan sumber-sumber PAD terus mengalami peningkatan.</p>
---	--

PENDAHULUAN

APBD diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu pengertian APBD juga tertera pada pasal 1 angka 7 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 mengatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri dari 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah yang dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat Jenis Pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang Sah.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi,1986).

Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$RKKD = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

1. Sanny Wurangian (2017) dalam penelitian yang berjudul :Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah Di Kota Tomohon. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengukur kemampuan daerah kota Tomohon dalam pelaksanaan otonomi daerah selama periode 2007-2015, serta untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah kota Tomohon dalam pelaksanaan otonomi daerah selama periode 2007-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan pola hubungan rasio

kemandirian yang ada di kota Tomohon dari tahun 2007-2015 adalah instruktif (rendah sekali). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan bagi daerah kota Tomohon.

2. Leady Tamboto (2014), dalam penelitian yang berjudul : Analisis kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama periode tahun 2008-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan ketidakmampuan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Suatu daerah dikatakan mampu menjalankan otonomi daerah apabila daerah tersebut sudah cukup baik dalam hal kinerja keuangan salah satunya. Sedangkan perimbangan keuangan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Untuk melihat apakah suatu daerah sudah mampu dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat melalui beberapa aspirasi :

1. Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah,
2. Besaran kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah,
3. Besaran kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah,
4. kemandirian keuangan daerah yang tercermin melalui besaran pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan besaran dana transfer yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah Kota Baubau
2. Untuk mengetahui kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD Kota Baubau
3. Untuk mengetahui kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah Kota Baubau

4. Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Kota Baubau

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis rasio yang didukung dengan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kinerja serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau Tahun 2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, literature, internet, catatan-catatan, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Anton Dajan (1991) yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Data APBD provinsi Sulawesi tenggara khususnya Kota Baubau Tahun 2015-2018.

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan tiga indikator kinerja keuangan yaitu kemandirian daerah, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah, peneliti menelusuri laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk mencari besaran nilai kinerja pemerintah daerah. Dari hasil penelusuran tersebut akan dipetakan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan dua indikator kemampuan keuangan yaitu rasio derajat otonomi fiskal dan indeks kemampuan rutin.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986).

Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) daerah adalah perbandingan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total bantuan daerah dan pinjaman daerah. Dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat melihat kondisi keuangan daerah dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Keuangan Daerah

Pertumbuhan keuangan daerah adalah perbandingan Pendapatan atau pengeluaran tahun berjalan dengan pendapatan atau pengeluaran tahun lalu. Pengukuran tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

t = tahun berjalan

t-1 = tahun sebelumnya

Kontribusi Sumber-sumber pendapatan asli daerah

1. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PD} = \frac{\text{Penerimaan PD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

PD = Pajak Daerah

PAD= Pendapatan Asli Daerah

2. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi RD} = \frac{\text{Penerimaan RD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

RD = Retribusi Daerah

PAD= Pendapatan Asli Daerah

3. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi kekayaan yang dipisahkan daerah terhadap pendapatan daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi KYD} = \frac{\text{Penerimaan KYD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

KYD = Kekayaan Yang Dipisahkan

PAD= Pendapatan Asli Daerah

4. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi lain-lain PAD yang sah daerah terhadap pendapatan daerah, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi LL PAD} = \frac{\text{Penerimaan LL PAD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

LL PAD = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

PAD= Pendapatan Asli Daerah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kontribusi Sumber-sumber pendapatan daerah

Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Baubau 2015-2018				
Uraian	2015	2016	2017	2018
PAD	3,35%	3,81%	5,43%	2,85%
Dana Transfer	73,36%	88,78%	84,60%	85,59%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	23,29%	7,40%	9,97%	11,56%

Sumber : Kota Baubau 2020

Table diatas menunjukkan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah ,dimana kontribusi PAD tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,43%,dan terendah pada tahun 2018 yaitu 2,85%.Kontribusi dana transfer tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 88,78%,dan terendah pada tahun 2015 yaitu 73,36%.Lain-lain

pendapatan yang sah tertinggi berada pada tahun 2015 yaitu 23,29% dan terendah pada tahun 2016 yaitu 7,40%.

2. Kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah

Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah				
Uraian	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	15,65%	10,69%	9,36%	24,18%
Retribusi Daerah	41,82%	37,42%	49,02%	6,73%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,49%	7,41%	5,94%	11,17%
Lain-lain PAD yang lain	32,03%	44,47%	35,67%	57,92%

Sumber : Kota Baubau 2020

Pada table diatas menunjukkan bahwa kontribusi sumber-sumber PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana nilai tertinggi terdapat pada kontribusi lain-lain pendapatan yang sah ,yaitu sebesar 170,09% dengan rata-rata 42,5%,sedangkan nilai terendah terdapat pada kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ,yaitu sebesar 35,02% dengan rata-rata 8,75%.

3. Kemandirian

Kemandirian (melihat Kinerja Keuangan Kota Baubau) 2015-2018			
2015	2016	2017	2018
4,57%	4,30%	6,41%	3,33%

Sumber : Kota Baubau 2020

Table diatas menjelaskan bahwa tingkat kemandirian Kota Baubau mengalami fluktuasi,dimana tingkat kemandirian tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 6,41% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 3,33%.

4. Pertumbuhan Sumber PAD

Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Baubau 2015-2018				
Uraian	2015	2016	2017	2018
PAD	-21,40%	43,14%	24,68%	-48,17%
Pendapatan Transfer	-23,71%	52,11%	-16,48%	-0,08%
Lain-lain Pendapatan yang	-36,45%	-60,04%	18,04%	14,49%

sah				
-----	--	--	--	--

Sumber : Kota Baubau 2020

Pada table diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah untuk PAD tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu 43,14% dan terendah pada tahun 2018 yaitu -48,17% artinya mengalami deficit pada tahun tersebut. Sedangkan untuk pendapatan transfer yang tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu 52,11% dan terendah pada tahun 2015 yaitu -23,71%. Dan lain-lain pendapatan yang sah tertinggi pada tahun 2017 yaitu 18,04% dan terendah pada tahun 2016 yaitu -60,04%.

Pembahasan

1. **Pertumbuhan Sumber Pendapatan Daerah.** Pada hasil analisis data yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan sumber pendapatan daerah khususnya pada PAD mengalami fluktuasi dari tahun-ketahun, yaitu pada tahun 2015 sebesar -21,40%, tahun 2016 mengalami peningkatan positif yaitu 43,14%, tahun 2017 menurun menjadi 24,68% dan tahun 2018 mengalami penurunan yang negative sebesar -48,17%. begitupun yang terjadi pada pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
2. **Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah.** Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap PAD sebesar 15,44% dengan rata-rata 3,86%, sedangkan dana transfer sebesar 332,34% dengan rata-rata 83,08% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 52,22% dengan rata-rata 13,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terbesar terhadap pendapatan daerah berada pada dana transfer yaitu sebesar 83,08% yang menunjukkan bahwa kontribusinya "sangat baik". Sedangkan kontribusi yang terendah berada pada PAD yaitu sebesar 3,86%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya menunjukkan "sangat kurang".
3. **Kontribusi Sumber-sumber PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah.** Pada hasil analisis data yang telah kami lakukan mengenai kontribusi sumber-sumber PAD terhadap pendapatan asli daerah, dimana kontribusi pajak daerah sebesar 59,89%, kontribusi retribusi daerah sebesar 135,00%, kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 35,02%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 170,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi yaitu Lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata 42,52% hal ini menunjukkan bahwa presentase

kontribusinya “Baik”. Dan kontribusi yang terendah berada pada kontribusi Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata 8.75%, hal ini menunjukkan bahwa presenrase kontribusinya “Sangat kurang”

4. Kemandirian daerah Kota Baubau. Berdasarkan hasil analisis data yang telah kami lakukan ,kemandirian daerah Kota Baubau pada tahun 2015 sebesar 4,57% hal ini menunjukkan bahwa kemandiriannya masih sangat rendah,pada tahun 2016 sebesar 4,30% yang menunjukkan kemandiriannya masih sangat rendah,hal tersebut juga terjadi pada tahun 2017 dan 2018,dimana keduanya menunjukkan tingkat kemandirian masih sangat rendah. Yang artinya Kota Baubau masih sangat bergantung pada peranan pemerintah pusat dan dapat dikatakan intruktif atau belum mampu melaksanakan otonomi daerah .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya,dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah Kota Baubau tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Dalam kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah Kota Baubau tahun 2015-2018, dana transfer memberikan kontribusi terbesar,sebesar 83,08% yang artinya memberikan kontribusi yang sangat baik.
3. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2015-2018, lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbanyak sebesar 42,52% yang menunjukan kontribusinya sangat baik.
4. Untuk kemandirian, tingkat kemandirian Kota Baubau pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi di tingkat yang rendah yang menunjukkan bahwa Kota Baubau belum dapat dikatakan mandiri dalam hal kinerja keuangan. Hsl ini menunjukkan pemerintah daerah Kota Baubau masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat, yang tergambar oleh sumbangan dana transfer yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Makka, Harry. 2015. ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KOTA

- KOTAMOBAGU. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 04 Tahun 2015.
- Anatasia Friska Palilingan, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere. 2015. ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MANADO. Jurnal Emba, Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal: 17- 25
- Dedi Nordiawan, Ayuningtyas Hertanti. 2010. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto, 2015. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH: BERBASIS AKRUAL, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH. Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta.
- Indah Sastri. Peni. 2019. ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA MODAL DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang REFOCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). xiii
- Jensen, Michael C. Dan W.H. Meckling. (1976). "THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COST AND OWNERSHIP STRUCTURE". Journal of Financial Economics 3. hal. 305-360.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang PERCEPATAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 tentang PENETAPAN KEDARUTAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2017-2020.

- Mahmudi. 2010. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- Mahsun, Muhamad. 2012. PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK. Yogyakarta: BPFE.
- Mardhiyah Ulfa. Siti. 2018. ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Mardiasmo. 2009. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Penerbit C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Nafarin Muhammad. 2015. PENGANGGARAN RENCANA KERJA PERUSAHAAN. Edisi Ketiga. Salemba Empat : Jakarta
- Nazir, Moh. (2009). METODE PENELITIAN. Bogor: Ghalia Indonesia xiv
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DAN ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 249).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ini MENGATUR TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM

KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6485).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH XV

Ramli Faud. 2016. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Bogor Ghalia Indonesia.

Sartika, D., & Nini. (2018). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA NAGARI LABUAH GUNUNG Jurnal ekonomi & bisnis dharma andalas, 20(1), 26–40.

Sugiyono. 2017. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung: Alfabeta.

Warti, Ratnasari. 2015. ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU. Jurnal Of Economic, Management and Accounting. Universitas Andi Djemma.

Widodo, Oka Purnawan dan Sudarno, 2017. PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”, Diponegoro Journal of Accounting, Vol.6, No.1, Hal.1-9, ISSN 2337-3806. Diakses 21 Januari 2018.

xvi